

Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar


Mustabir Daming¹, Andi Agustang², Andi Muhammad Idkhan³, Rifdan⁴

¹Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

²Program Studi Doktor Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

³Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Makassar

⁴Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received 16 November 2021 Publish 18 November 2021</p>	<p>Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk menganalisis dan mengkaji secara empirik Implementasi kebijakan makassar recover dalam penanganan Covid-19 di Makassar, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan makassar recover dalam penanganan Covid-19 di Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan realita empiris dibalik fenomena yang terjadi dan mencocokkan dengan teori yang ada dengan pendekatan studi kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (<i>library research</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan kegiatan Makassar <i>Recover Ecosystem</i> (MRE) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. (2) Ada empat faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan makassar recover dalam penanganan Covid-19 di kota Makassar, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.</p>
<p>Keywords: Implementasi, Kebijakan, Makassar Recover System.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>	
	
<p>Corresponding Author: Mustabir Daming Program Studi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar. Email: andiagust63@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat saat ini sejak mewabahnya Covid-19 banyak membawa dampak sosial dengan tata sosial masyarakat dengan budayanya yang luar biasa diobrak abrik dengan virus ini. Berbagai hal yang selama ini dilakukan dibatasi, seperti penghentian sementara aktifitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang, penghentian sementara aktifitas ditempat fasilitas umum dan audiensi diatas 5 orang. Tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti dengan *Work From Home* (WFH) dan sekolah ditutup atau siswa belajar dari rumah. Kondisinya sangat terasa di kehidupan masyarakat saat ini atau setidaknya masyarakat telah sedikitnya merasakan perubahan. Tata sosial dan budaya masyarakat kita ini terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman, bahkan cipika cipiki senyum sapa hangat yang selalu terpancar. Saat ini, yang terjadi, senyum itu seakan hilang tertutup masker yang beraneka ragam bentuk dan warna, tidak lagi bisa bersalaman dan cipika cipiki karena saat ini harus jaga jarak akibat wabah ini. Kebiasaan masyarakat kita berkumpul untuk menghadiri kegiatan arisan, undangan hajatan, kegiatan kegiatan kemasyarakatan, beribadah bersama dan lainnya dilakukan dan menjadi hal yang rutin. Saat ini, kondisi tersebut menjadi hal yang sangat dirindukan bahkan diimpikan, sementara kita harus lebih banyak berdiam diri di rumah dan hanya diperbolehkan keluar bila benar benar ada keperluan yang urgent. Meskipun demikian ada beberapa hal yang masyarakat merasakan hal positif yang bisa menjadi pembelajaran berharga dan dirasakan langsung, diantaranya orang jadi semakin dekat dengan suami dan anak anak, ngobrol, bercanda

dan mengeluarkan hal hal yang terpendam dan selama ini susah dilakukan. Orang semakin kreatif di rumah, selalu berkreasi untuk seluruh anggota keluarga supaya lebih nyaman dan betah di rumah. Lainnya adalah orang semakin sensitif dengan hal hal yang biasanya tidak kita pedulikan, misalnya kepedulian dengan kebersihan rumah, kepedulian dengan dengan kondisi rumah lainnya.

Kebijakan pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini, hal ini merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 [1]. Lebih lanjut, menurut [2] terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Menurut [3] kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut [4] dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi maka dibutuhkan serangkaian rencana program, kegiatan, tindakan, hasil akhir, perilaku, untuk melakukan tindakan maupun tidak bertindak yang dilaksanakan oleh aktor (pihak-pihak), itulah yang dinamakan dengan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Makassar”**.

2. METODE

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang implementasi Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka/ *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku saku makassar recover. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang impementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipakai adalah analisis isi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar.

Kajian implementasi kebijakan publik pada hakikatnya memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan [5]. Sehingga fokus implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat /dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sebab setiap kebijakan yang diimplementasikan pasti menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan (*intended risk and unintended risk*). Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dimaksud, dan menciptakan ketaatan bagi kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat

dan pada akhirnya menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kondisi perekonomian, jaringan kekuatan politik dan perangkat administrasi pelaksanaan kebijakan sendiri. Berbagai cara saat ini dilakukan masyarakat dalam mendorong meningkatnya imunitas diri agar tidak mudah sakit dimasa Pandemi Covid- 19. Sebagaimana diketahui bahwa sistem imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas tubuh harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, memiliki daya tahan tubuh yang kuat sangat penting untuk mencegah kita jatuh sakit, terutama di masa mewabahnya virus Covid-19. Adapun pelaksanaan kebijakan Makassar Recover dalam penanganan Covid-19 di Kota Makassar, yaitu:

1. Imunitas Kesehatan

Sebagai implementasi visi dan misi yang terkandung dalam misi ke-2 Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2021-2024, telah disusun sebuah Inovasi yang merupakan strategi dalam penanggulangan Covid-19 secara komprehensif diseluruh wilayah Kota Makassar.

2. Adaptasi Sosial

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adaptasi sosial diartikan sebagai langkah penyesuaian diri yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial pada masing-masing individu. Dimasa pandemic Covid-19 Artinya bahwa adaptasi sosial menjadi penting untuk menyusun skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Bahkan Menteri Kesehatan RI telah menyiapkan protocol terkait kehidupan adaptasi kebiasaan baru melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Sekaitan dengan itu, Pemerintah Kota Makassar telah menyusun 9 strategi dalam adaptasi sosial dimasa pandemi Covid-19 sebagai langkah penanggulangannya. Langkah-langkah tersebut dikhususkan kepada penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Makassar.

3. Pemulihan Ekonomi.

Dalam konteks pemulihan ekonomi Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di daerahnya. Ikut menyokong berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, UMKM, jasa pariwisata (hotel, Restoran dan lainnya), dan perlindungan sosial. Termasuk juga sektor pendidikan dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Makassar khususnya, dalam membantu melancarkan proses pembelajaran jarak jauh dan membantu kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan terutama kepada para guru Non PNS atau honorer.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Makassar.

Implementasi kebijakan sebagai suatu tahapan yang terletak diantara perumusan kebijakan dan hasil-hasil atau konsekuensi-konsekuensi (*Out put* dan *out comes*) yang ditimbulkan oleh kebijakan. Edwards III menyebutkan “ ada empat (4) faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi”.

Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan setiap unsur manusia dan sumber daya akan selalu berusaha dengan permasalahan “ bagaimana hubungan yang dilakukannya”. Menurut [6] pencapaian

keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam [7] komunikasi mempunyai peranan penting, tidak hanya bagi para *implementor* tetapi juga bagi *policy maker*. Untuk itu, penting adanya konsistensi komunikasi dari atas ke bawah yang tegas dan jelas sehingga tidak ada kelonggaran bagi pelaksana untuk menafsirkannya berbeda, perlunya ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan, informasi mengenai mekanisme dan aturan pelaksanaan kebijakan disampaikan pada orang yang tepat [8].

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari terjadinya gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan manusia. Baik verbal maupun non verbal. Manusia berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain.

Komunikasi memiliki tiga komponen dasar yang penting yaitu pengirim pesan, pesan dan penerima pesan. Dalam kebijakan beras miskin, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada penerima makassar recover. Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangat kecil. Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan dalam hal ini pemerintah kota Makassar dan penerima kebijakan yaitu masyarakat kota Makassar.

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan atau aturan serta akuratnya komunikasi, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakannya kurang memiliki sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Menurut [9] pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa

Sumber – sumber dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan (pimpinan). Disamping itu, ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki. Termasuk juga fasilitas yang merupakan sarana untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : gedung (kantor), peralatan, dan dana intensif yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah memadai dan mencukupi sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan. Pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah

menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan.

Keberhasilan sebuah program di dukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Sumber daya pelaksana program makassar recover boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.

3. Faktor Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan kebijakan [10]. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana harus mengetahui apa yang mesti dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup.

Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. Jika pelaksana implementasi kebijakan mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Namun apabila sikap pelaksana kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat bahkan gagal. Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi. Penempatan staf yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian spesialisasinya. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal, staf yang ada pada badan implementor harus ditempatkan pada bagian keahliannya masing-masing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan harus selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain agar staf tersebut dapat termotivasi dan melakukan hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya.

4. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Suatu kebijakan cukup dan para pelaksana memahami tujuan dan bagaimana cara melaksanakannya, serta mereka pun mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi masih belum efektif karena ketidakefektifan struktur birokrasi (*disefficiencies bureaucratic structur*) yang ada. Sebab keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya fragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangikan koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks. Inefisiensi struktur birokrasi juga dapat memboroskan sumber-sumber daya yang langka, terjadinya kekacauan dan kebingungan yang kesemuanya akan mengarah pada penyimpangan pelaksanaan kebijakan dari tujuannya. Menurut [11] kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

Struktur birokrasi mencakup aspek – aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Menurut Edward III (1980), variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah

tersedia atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar yang dimaksudkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (Standard Operating Procedure) dan adanya fragmentation. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab. SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksana implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan Makassar Recover, SOP diganti dengan petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur kebijakan Makassar Recover agar terlaksana dengan baik.

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan Makassar *Recover Ecosystem* (MRE) yang dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi adalah merupakan langkah strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar diawal Pemerintahan Walikota/Wakil Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi. Melalui program strategis ini kondisi Pandemi Covid-19 dapat tertanggulangi dengan tersistem yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun dengan melibatkan relawan, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Kota Makassar.
2. Ada empat (4) faktor yang saling berinteraksi dalam implementasi kebijakan makassar recover dalam penanganan Covid-19 di kota Makassar, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, dan faktor struktur organisasi atau birokrasi.

SARAN

1. Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai eksponen masyarakat.
2. Masyarakat kota Makassar diharapkan memberi dukungan kepada program MRE agar terciptanya kondisi kesehatan yang terjaga.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Asri, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid 19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat," *Visioner J. Pemerintah. Drh.*, vol. 12, no. 4, pp. 695–712, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/330>.
- [2] A. Ramdhani and M. A. Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *J. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2017.
- [3] A. Uamang, C. Indra, and C. Sasmito, "Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua

- Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017),” *Reformasi*, vol. 8, no. 1, pp. 47–57, 2018.
- [4] M. I. R. Tumoka, “Kebijakan Tata Kelola Layanan di Masa Pandemi Covid-19 di Universitas Muhammadiyah Sorong,” *Qalamuna, J. Pendidikan, Sos. dan Agama*, vol. 13, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.37680/qalamuna.v13i1.688.
- [5] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2010.
- [6] L. Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy,” *J. Borneo Adm.*, vol. 16, no. 2, pp. 253–270, 2020, doi: 10.24258/jba.v16i2.685.
- [7] Anang Sugeng Cahyono, “Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19,” *J. PUBLICIANA*, vol. 13, no. 1, pp. 83–88, 2021, doi: 10.36563/p.v13i1.207.
- [8] Mujiyanto Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi,” *Religi*, vol. 6, no. 2, pp. 148–178, 2015.
- [9] A. I. M. Melinda Triana Pangaribuan, “Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [10] H. M. Dewi Wuryandani, “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *urnal Ekon. Kebijak. Publik*, vol. 4, no. 1, pp. 103–115, 2013.
- [11] I. N. Juaningsih, Y. Consuello, A. Tarmidzi, and D. NurIrfan, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia,” *Salam J. Sos. dan Budaya Syari*, vol. 7, no. 6, pp. 509–518, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363.